

ABSTRAK

Keberlanjutan kepemimpinan kepala desa dalam pilkades bukan hanya soal kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga bukti kepercayaan dan dukungan berkelanjutan dari warga desa terhadap kepala desa tersebut. Mengindikasikan bahwa kepala desa telah memenuhi harapan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas kinerjanya selama masa jabatan pertama. Penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana bentuk legitimasi kepala desa Pawindan dalam dua periode kepemimpinannya.. Tujuan penelitian ini untuk untuk mendapatkan Gambaran dan penjelasan tentang bentuk legitimasi kepala desa Pawindan dalam dua periode kepemimpinannya.. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Legitimasi Max Weber yang mengklasifikasikan legitimasi politik ke dalam tiga tipe ideal (legitimasi tradisional, karismatik, legal-rasional).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi Kepala Desa Pawindan bersifat hibrid dengan dominasi legitimasi tradisional yang sangat kuat. Legitimasi tradisional bersumber dari posisi Ahmad Kartoyo sebagai putra kepala desa pertama pasca pemekaran, yang menciptakan sistem kepemimpinan yang menyerupai dinasti politik berbasis keturunan. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat dari berbagai segmen mulai dari generasi muda hingga lansia menerima kepemimpinannya terutama karena faktor keturunan dan jaringan kekerabatan yang luas dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Legitimasi legal-rasional juga berkembang signifikan melalui transparansi pengelolaan keuangan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, partisipasi inklusif dalam musyawarah desa, serta mekanisme perencanaan berbasis data dan aspirasi masyarakat. Implementasi program bantuan sosial yang transparan dengan prosedur berjenjang memperkuat legitimasi berbasis kinerja. Masyarakat penerima manfaat menilai kepemimpinan berdasarkan hasil kerja konkret yang dapat dirasakan langsung, menunjukkan transisi bertahap dari legitimasi murni tradisional menuju sistem yang lebih rasional dan prosedural.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi Kepala Desa Pawindan merupakan hibridisasi legitimasi dalam masyarakat transisional, dimana legitimasi tradisional tetap menjadi fondasi utama yang kemudian diperkuat oleh legitimasi legal-rasional melalui kinerja administratif dan kepatuhan procedural, ini mencerminkan dinamika modernisasi politik di tingkat desa, dimana institusi demokratis dan legal-rasional diimplementasikan namun belum sepenuhnya menggantikan struktur legitimasi tradisional yang telah mengakar.

Kata Kunci: Legitimasi, Kepala Desa, Pilkades

ABSTRACT

The sustainability of a village head's leadership in a village head election (pilkades) is not only about winning the election, but also evidence of the continued trust and support of the village head from the villagers. This indicates that the village head has met expectations and earned legitimacy from the community for his performance during his first term. This study aims to explain the forms of legitimacy of the Pawindan village head during his two terms of leadership. The purpose of this study is to obtain an overview and explanation of the forms of legitimacy of the Pawindan village head during his two terms of leadership. The theory used in this study is Max Weber's Legitimacy Theory, which classifies political legitimacy into three ideal types (traditional, charismatic, and legal-rational).

The results show that the legitimacy of the Pawindan village head is hybrid, with a very strong dominance of traditional legitimacy. Traditional legitimacy stems from Ahmad Kartoyo's position as the son of the first village head after the expansion of the village, which created a leadership system resembling a hereditary political dynasty. The findings indicate that community members from various segments, from the younger generation to the elderly, accept their leadership primarily due to hereditary factors and extensive kinship networks with community and religious leaders.

Legal-rational legitimacy also develops significantly through transparent village financial management, compliance with laws and regulations, inclusive participation in village deliberations, and data-driven planning mechanisms based on community aspirations. The transparent implementation of social assistance programs with tiered procedures strengthens performance-based legitimacy. Beneficiary communities assess leadership based on tangible, tangible results, demonstrating a gradual transition from purely traditional legitimacy to a more rational and procedural system.

This study concludes that the legitimacy of the Pawindan Village Head represents a hybrid of legitimacy in a transitional society, where traditional legitimacy remains the primary foundation, further strengthened by legal-rational legitimacy through administrative performance and procedural compliance. This reflects the dynamics of political modernization at the village level, where democratic and legal-rational institutions are implemented but have not yet completely replaced entrenched traditional legitimacy structures.

Keywords: Legitimacy, Village Head, Village Head Election